

# **Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya**

**Mohamad Lutfi Agung Kurniawan**

09040674257 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email : (lutfiaku5@gmail.com)

**Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP**

(S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA)

## **Abstrak**

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Namun dalam pelaksanaan peraturan tersebut terdapat beberapa masalah diantaranya; masih terdapat penumpukan sampah di beberapa lokasi terutama daerah pinggiran Kota Surabaya, Kesadaran Masyarakat Dalam membuang sampah dan volume sampah yang tiap hari kian meningkat. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dengan menggunakan 6 variabel keberhasilan Van Matter Van Horn, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Data primer diperoleh dari informan langsung yakni implementor dan kelompok sasaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, catatan, dokumentasi dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Indikator ketercapaian Implementasi peraturan daerah kota Surabaya No. 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan kebersihan kota Surabaya dapat dibuat kesimpulan. Ukuran dan tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas. Sumber Daya Manusia yang dimiliki dinas kebersihan dan pertamanan kota Surabaya dirasa sudah cukup dengan jumlah sebanyak 470 pegawai. Namun jika dilihat dari beban kerja Sumber Daya Manusia masih kurang Sumber Daya Keuangan didukung oleh sumber keuangan yang jelas yang berasal dari APBD, Namun apakah sumber daya keuangan sudah mempertimbangkan cakupan luas tentang permasalahan sampah. Karakteristik Agen Pelaksana adalah kerjasama masyarakat dengan pemerintah menunjukkan kerjasama yang baik mulai dari tingkat dasar. Sikap atau kecenderungan para pelaksana ditunjukkan konsistensi dari pegawai dinas Kebersihan dan pertamanan kota Surabaya melalui inovasi pengolahan sampah. Komunikasi antar organisasi yang dilakukan masih sebatas komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dan masyarakat. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terlaksana dengan baik dengan adanya bank sampah dan dukungan dari DPRD Kota Surabaya. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, jumlah sumber daya manusia perlu penataan pegawai sebaiknya disesuaikan dengan beban kerja, Peningkatan komitmen untuk penciptaan inovasi baru perlu ditingkatkan. Komunikasi antar organisasi lebih diperluas kepada organisasi perangkat daerah yang berkepentingan.

**Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah**

## **Abstract**

*Surabaya City Government of Surabaya City issued a local regulation No. 5 of 2014 on Waste Management and Sanitation in the city of Surabaya. The regulation contains the implementation of waste management that aims to improve public health and environmental quality as well as to utilize waste as a resource. but in the implementation of these regulations, there are several problems including; they are the accumulation of garbage in several locations especially suburb of Surabaya, Awareness In taking out the trash and volume of waste that every day is increasing. This research type is descriptive. The research focus is on the implementation of Regional Regulation Surabaya No.*

*5 of 2014 on Waste Management and Hygiene in Surabaya using 6 variable success Van Matter Van Horn, the size and policy objectives, resources, characteristics of the executing agency, the attitude / tendency of the implementers , communication between organizations and activists implementers, economic environment, social and political. The primary data obtained from informants direct the implementor and the target group, while secondary data obtained from books, records, and other documentation. Data was collected through interviews and documentation. Data analysis techniques, conducted with data reduction, data presentation and verification as well as the conclusion. indicators of achievement Implementation of local regulations Surabaya No. 5 of 2014 on waste management and cleanliness of the city of Surabaya conclusions are derived. The size and purpose of the implementation of the Regional Regulation No. 5 of 2014 was clear. Human Resources owned offices cleanliness and landscaping thats enough Surabaya city with a total of 470 employees. However, if viewed from the workload of Human Resources are lacking Financial Resources is supported by a clear financial resources coming from the budget, but if the financial resources are already considering the wide scope of the problem of garbage. Characteristics of the Implementing Agency is the public's cooperation with the government indicate good cooperation from the ground level. Attitude or inclination of the implementers demonstrated the consistency of civil servants Hygiene and Surabaya city parks through innovative waste processing. Communication between organizations that do still limited to communications between the Department of Hygiene and Dan society. Social, economic, political and performing well with their waste banks and support of DPRD Surabaya. Socialization needs Regional Regulation No. 5 of 2014, the number of human resources employees need the arrangement should be adjusted to the workload, Increased commitment to the creation of new innovations need to be improved. Communication between the organization further expanded to the regional organizations concerned.*

**Keywords: Implementation, Waste Management**

## **PENDAHULUAN**

Menanggapi permasalahan Sampah Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. masih saja ditemukan permasalahan dalam hal Lingkungan. Namun Penumpukan sampah masih terlihat disekitar Kota Surabaya, terutama diwilayah pinggir Kota Surabaya. Seperti daerah Kecamatan Kenjeran masih terlihat penumpukan sampah dikali kenjeran dan di kali sekitar Kecamatan Morokrempangan.

Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Surabaya selaku instansi Pemerintah Daerah yang menangani teknis pengelolaan sampah di Kota Surabaya, harus ekstra kerja keras dalam menyelesaikan masalah sampah. Peran dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya amat penting dalam menangani masalah sampah di Kota Surabaya. Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Surabaya mempunyai tugas dalam pengelolaan, pengangkutan dan pemanfaatan sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan Kota Surabaya dan memberikan monitoring terhadap pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas Penulis ingin melakukan penelitian tentang implementasi dari Peraturan Daerah

mengenai kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kota Surabaya. Penulis ingin mengetahui apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah mewujudkan dampak atau hasil yang dikehendaki. Van metter dan Van Horn mengemukakan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dengan teori Van Metter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimnapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, Ikalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuaan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Widodo, 2007:85).

Leo agustino mengutip Van meter dan Van Horn (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo 2007:88) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Jones dalam gaffar (Widodo, 2007:89) mengatakan aktivitas imlementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut :

1. *Organization; the stablishment or rearrangement of resource, unit and methods for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation; the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directive.*
3. *Application; the routin provision of service, payments, or other agree upon objective or instruments.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resource*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (*penjelasan*) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Adapun beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli, antara lain :

### **1. Teori Model Donald Van metter dan Carl Van Horn**

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A model of the policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variable, menurut Van metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, adalah :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap/kecenderungan
- e. Komunikasi antar organisasi dan akitivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, Sosial, Politik

### **2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier**

Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for policy implementation analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan public adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. dan, variabel-variable yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu ;

- a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
  - 1) Kesukaran-kesukaran teknis
  - 2) Keberagaman perilaku yang diatur
  - 3) Presenatase totalitas penduduk yang terckup dalam kelompok sasaran
  - 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, dengan melalui beberapa cara :
  - 1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai .
  - 2) Keterandalan teori kasualitas yang diperlukan.
  - 3) Ketetapan alokasi sumber dana
  - 4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
  - 5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

- 6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
- 7) Akses formal pihak-pihak luar
- c. Variable-variabel undang-undang yang mempengaruhi implementasi
  - 1) Kondisi social-ekonomi dan teknologi
  - 2) Dukungan public
  - 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
  - 4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

### 3. Model George C Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi, terdapat tiga indicator dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, yaitu :
  - 1) Transmisi
  - 2) Kejelasan
  - 3) konsistensi
- b. Sumberdaya, indicator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :
  - 1) Staf
  - 2) Informasi
  - 3) Wewenang
  - 4) fasilitas
- c. Disposisi, hal penting yang perlu dicermati pada variabel ini adalah
  - 1) Pengangkatan birokrat
  - 2) insentif
- d. Struktur birokrasi,

### 4. Model Merilee S Grindle

Keberhasilan implementasi public menurut Grindle amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

- a. *Content of policy*, merupakan :
  - 1) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
  - 2) *Type of benefits* (tipe manfaat)
  - 3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
  - 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)
  - 5) *Program implementer* (pelaksana program)
  - 6) *Resource commited* (sumber-sumber daya yang digunakan)
- b. *Context of policy*, adalah :

- 1) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat)
- 2) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- 3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Peneliti memilih teori Van Matter dan Van horn sebagai landasan teori guna mengukur keberhasilan implementasi Kebijakan. Peneliti memilih teori Van Matter dan Van Horn Karena teori tersebut mencakup keseluruhan agen pelaksana pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Adapun 6 Variabel yang menentukan keberhasilan implementasi Kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn, yaitu :

- 1. Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2. Sumber daya
- 3. Karakteristik agen pelaksana
- 4. Sikap/kecenderungan
- 5. Komunikasi antar organisasi dan akitivitas pelaksana
- 6. Lingkungan ekonomi, Sosial, Politik

### METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya (Deddy Mulyana, 2002:207). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial (Deddy Mulyana, 2002:201). Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.

Fokus dalam penelitian ini adalah peneliti ingin menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya). Penelitian menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dalam menganalisa keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah dan Kebersihan, dengan menggunakan variable berikut :

- 1. Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2. Sumber daya
- 3. Karakteristik agen pelaksana
- 4. Sikap/kecenderungan

5. Komunikasi antar organisasi dan akitivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, Sosial, Politik

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi di kantor ini adalah dikarenakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya merupakan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya dan merupakan pelaksana teknis dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide/panduan wawancara (Moh. Nazir, 1988:234). Wawancara bisa juga disebut teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber berita atau pihak yang dapat memberikan informasi yang dapat memudahkan pewawancara untuk mengumpulkan data.

wawancara dilakukan kepada para nasumber guna memperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Adapun narasumber wawancara sebagai berikut:

- a. Bapak Satria selaku pegawai Dinas Kbersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya, Jabatan Kasie Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Ibu Vika selaku pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya, Jabatan Staff Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Ibu Heni selaku masyarakat Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jamangan, Kota Surabaya.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:135), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dokumentasi juga bisa diartikan sebagai teknik mencari data atau mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Joko Subagyo (2006:94), metode deskriptif kualitatif adalah metode

yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan yang berupa deskripsi dengan narasi, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Metode analisis data yang digunakan penelitian adalah metode yang dikembangkan Miles dan Huberman di mana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2010:160).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan di Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil jika memenuhi 6 (enam) variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Mater Van Horn yang menjadi landasan teori penelitian ini. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijabarkan 6 (enam) variabel keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut :

#### a. Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implemantasi kebijakan dapat diketahui keberhasilannya jika ukuran dan tujuan terarah dengan baik dan tepat sasaran pada kelompok sasaran. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya memiliki Tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Arah tujuan kebijakan sudah jelas, diharapkan dalam implementasinya juga berjalan dengan baik.

Pelaksana kebijakan harus memahami tujuan suatu kebijakan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Arah kebijakan yang dibuat juga harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Penyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang tercantum pada peraturan daerah kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 adalah pemerintah daerah, yaitu Walikota Surabaya dan

organisasi perangkat daerah (Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya).

### b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga tidak lepas dari faktor sumber daya. Sekuat dan sebanyak apapun sumber daya apabila tidak terkoordinasi dengan baik maka suatu implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Tanpa adanya sinergi dari kedua sumber daya tersebut, implementasi kebijakan akan sulit terlaksana. Indikator sumber daya tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan. Jumlah sumber daya manusia yang mencukupi dan kompeten amatlah penting guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun jumlah pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai Berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya**

Golongan	PNS	CPNS	Jumlah
IV	5	-	
III	32	2	
II	284	10	
I	138	8	
Jumlah	459	20	479

Sumber: Buku Profil Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berjumlah 479 orang. Jumlah tersebut dirasa cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, namun masih saja ada hambatan dalam masalah sumber daya manusia. Seperti pegawai yustisi dilapangan, hanya terdapat 10 pegawai yang bertugas dalam yustisi. Sedangkan tugas mereka adalah setiap hari berkeliling untuk mengawasi apakah ada pelanggaran yang dilakukan orang/perusahaan dan memberikan peringatan dan sosialisasi dalam masalah kebersihan. Berkenaan dengan mutu pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya yang

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014.

#### 2) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan amat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena apabila tidak ada anggaran suatu kebijakan tidak akan berjalan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Surabaya sudah menjelaskan di BAB XIII pasal 40 yang berisi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

Pengelolaan sampah di Kota Surabaya agen pelaksana sudah dilakukan dari tingkat paling dasar yaitu masyarakat dan pemerintah, dalam hal Ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Masyarakat telah diberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik atau yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaca dan kertas. Sampah organik juga dipisah dan dijadikan kompos. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah menyediakan Bak Komposter di tiap Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Surabaya.

Terdapat Bank sampah sebanyak 240 yang tersebar dan di wilayah Kota Surabaya. Bank sampah ini digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat yang sudah dipilah seperti plastic, botol, kaca yang bisa didaur ulang atau dijual. Masyarakat pun dalam hal ini bisa mendapat pendapatan dari hasil menjual sampah tersebut ke Bank Sampah. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya Bank Sampah. Selain mendapatkan uang juga kebersihan lingkungan terjaga dengan adanya Bak komposter yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan pupuk pada tanaman di rumah mereka

### d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Sikap para pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah terlihat baik. Pembagian tugas yang sistematis membuat system pengelolaan sampah di Kota Surabaya berjalan dengan baik. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya terus Berinovasi dan berupaya maksimal dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Surabaya.

Adapun beberapa teknologi dan inovasi yang dilakukan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan Sistem SWAT (*Solid Waste Transportation*). Untuk PLTSA saat ini yaitu berada di Wonorejo dan TPA Benowo. Untuk PLTSA Benowo telah menghasilkan 12 mega watt listrik per hari. Dalam hal ini pihak pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan PT PLN untuk memanfaatkan PLTSA Benowo agar bisa mengaliri listrik I wilayah surabaya. *System Waste Transportation* (SWAT) merupakan sistem pengawasan terhadap jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan penggunaan BBM melalui Truck Sampah. Setiap Truk sampah yang jalan akan diberikan surat jalan yang didalam surat tersebut terdapat barcode yang harus discanning di saata akan berangkat dan tiba di tempat parkir Truk.

#### **e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementor program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Pengelolaan sampah Kota Surabaya secara

struktural tanggung jawab Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya. Komunikasi antar organisasi penting dalam program pengelolaan sampah. Komunikasi antar dinas terkait dan masyarakat penting guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 30 BAB VIII tentang sistem informasi menyebutkan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya selalu melakukan sosialisasi secara langsung dan secara elektronik. Adapun petugas Yustisi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya memiliki tugas selain melakukan yustisi atau penertiban juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kebersihan.

#### **f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik**

Faktor lingkungan juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Lingkungan sekitar dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sejauh mana lingkungan sekitar mendukung pelaksanaan suatu kebijakan akan mempengaruhi tujuan suatu kebijakan. lingkungan ekonomi, sosial, politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilihat dari lingkungan Ekonomi, penyelenggaraan pengelolaan sampah telah memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian warga Surabaya. Bank sampah sebagai media masyarakat dalam memberikan manfaat yang baik agar masyarakat peduli terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah. Melalui bank sampah masyarakat selain mendapat kompensasi juga memberikan pelajaran yang baik dalam hal pengelolaan sampah.

Lingkungan sosial, politik sangat mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Anggaran Pengelolaan sampah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya amat mendukung dalam sistem penganggaran pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan

atau suatu hal yang diperhatikan Agustino, (2008:7). Oleh karena itu pemerintah berhak untuk melakukan sesuatu atau membuat kegiatan serta membuat kebijakan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini masalah pengolahan sampah di kota Surabaya telah dibuat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan di Kota Surabaya. Peraturan yang dibuat diharapkan mampu menjawab permasalahan sampah di kota Surabaya.

Keberhasilan suatu program atau kebijakan dapat dilihat dari beberapa variabel. Menurut Van Meter Van Horn dalam buku Widodo (2013:96), keberhasilan dalam mencapai tujuan program harus memiliki enam variabel yaitu : 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan, yaitu kemampuan yang di sesuaikan dengan tujuan maka akan tercapainya suatu kebijakan; 2). Sumberdaya, yaitu kualitas atau daya kerja setiap pihak pelaksana, pemberi pelayanan dan penerima pelayanan serta sumber biaya maupun jasa yang telah diterapkan dalam melaksanakan program tersebut; 3). Karakteristik agen pelaksana, yaitu para pelaksana program mempunyai karakter sesuai dengan aturan atau sanksi yang berlaku; 4). Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, yaitu sikap dan karakteristik yang harus dimiliki oleh implementor pelaksana program dan pemberi pelayanan masyarakat seperti komitmen, kejujuran, konsistensi, dll; 5). Komunikasi, yaitu saling berhubungannya pihak penyelenggara dengan pemberi pelayanan dan penerima pelayanan yang ada; 6). Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yaitu kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting padakeinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi pelaksana.

Menyangkut enam variabel tersebut serta hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait maka data dapat di analisis dan di deskripsikan sebagai berikut :

### **1. Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Suatu kebijakan dapat dilihat keberhasilan tentu dengan melihat ketercapaian setiap indikator yang ada. Dalam hal ini ketercapaian tujuan juga menjadi penting untuk diketahui, tujuan utama dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan di Kota Surabaya menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemrosesan atau pengelolaan sampah. Dasar hukum yang kuat dapat menjadikan setiap pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. hal ini memungkinkan karena sudah adanya rambu-rambu yang jelas tentang pelaksanaan tersebut mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan tahap paling akhir.

Tentu saja dengan tidak mengesampingkan tujuan akhir dari pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan kualitas lingkungan yang baik tentu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat kebersihan setiap sudut kota Surabaya juga menjadi tujuan pertama yang harus dicapai dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Ukuran kebersihan dari setiap sudut kota adalah yang paling utama.

Selain perubahan tingkat kebersihan, ukuran lain yang perlu diketahui adalah berupa perubahan kinerja para pelaku pengolahan sampah yang ada di kota Surabaya menjadi lebih aktif, karena semakin banyaknya proses pengolahan sampah mulai dari pemilahan sampah sampai dengan pemrosesan akhir. Ukuran ini dapat diketahui dari pengolahan sampah yang sudah dilakukan dari tingkat paling dasar, yaitu tingkat RW. Setiap RW di kota Surabaya, minimal memiliki 1 bank sampah. Dengan aturan seperti ini dapat mengurangi volume sampah yang akan diproses di TPA.

Setiap bank sampah melakukan proses pemilahan untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Sampah yang di daur ulang seperti kertas, plastic, kaca dan botol. Selain itu, terdapat komposter yang gunanya adalah mengolah sampah-sampah organic menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk pertanian, taman atau kebun..

### **2. Variabel Sumber Daya**

Faktor penting dalam pengelolaan sampah yang ada di Surabaya tidak terlepas dari variable sumber daya. sumber daya yang mampu terkoordinasi dengan baik mampu menghasilkan pekerjaan yang baik pula, sehingga diperoleh hasil maksimal dan memuaskan. Terdapat dua bagian sumber daya yang sangat penting. Diantaranya yaitu:

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan. Jumlah sumber daya manusia yang mencukupi dan kompeten amatlah penting guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan sumber yang ada diketahui bahwa pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya berjumlah 479 orang.

Jumlah tersebut dirasa cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, namun masih saja ada hambatan dalam masalah sumber daya manusia. Seperti pegawai yustisi dilapangan, hanya terdapat 10 pegawai yang bertugas dalam yustisi. Sedangkan tugas mereka setiap hari berkeliling untuk mengawasi pelanggaran yang dilakukan orang/perusahaan dengan memberikan

peringatan dan sosialisasi dalam masalah kebersihan. Dengan jumlah yang minim tersebut tidak lantas membuat kinerja minim juga. Hal tersebut dikarenakan kompetensi yang dimiliki setiap pegawai sudah disesuaikan dengan ijazah terakhir mereka. Jadi setiap pegawai, bukan hanya pegawai yustisi pasti akan mampu untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut.

#### b. Sumber Daya Keuangan

Selain sumber daya manusia faktor penting lainnya adalah Sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan amat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena apabila tidak ada anggaran suatu kebijakan tidak akan berjalan. Terlebih pengelolaan sampah yang memerlukan penanganan khusus dan terkoordinasi dengan baik. Untuk sumber keuangan dari pengelolaan sampah secara khusus pemerintah kota Surabaya telah menganggarkan pembiayaan pengelolaan sampah ini dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya.

Hal ini dapat diketahui dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Surabaya BAB XIII pasal 40 yang berisi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Variabel Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam implementasi peraturan daerah ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang dipengaruhi oleh ciri-ciri para agen. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan pada saat hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Pengelolaan sampah di Kota Surabaya agen pelaksana sudah dilakukan dari tingkat paling dasar yaitu masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal perlu kerjasama yang baik dari kedua agen pelaksana tersebut. Kerjasama tersebut berupa pemberian edukasi tentang cara memilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik seperti plastik, kaca dan kertas dapat didaur ulang langsung menjadi barang tepat guna atau diolah kembali menjadi produk baru. Sedangkan sampah organik juga dipisah dan dijadikan kompos untuk dapat dimanfaatkan menjadi pupuk bagi pertanian dan perkebunan.

Kegiatan masyarakat dalam pengolahan sampah telah difasilitasi oleh pemerintah dengan menyediakan komposter untuk membuat kompos di setiap RT. Terdapat minimal 1 komposter di setiap RT di kota Surabaya. Selain komposter di setiap RT, di setiap RW juga terdapat Bank sampah. Kurang lebih terdapat 240 bank sampah yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Bank sampah ini digunakan untuk menampung sampah dari masyarakat yang sudah dipilah seperti plastic, botol, kaca yang bisa didaur ulang atau dijual. Masyarakat pun dalam hal ini bisa mendapat pendapatan dari hasil menjual sampah tersebut ke Bank Sampah.

Pengelolaan sampah dengan bekerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat saling menguntungkan. Pemerintah menjadi ringan beban pekerjaannya. Sedangkan, Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya Bank Sampah. Selain mendapatkan uang juga kebersihan lingkungan terjaga dengan adanya Bank komposter yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan pupuk pada tanaman di rumah mereka.

### 4. Variabel Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana merupakan hal yang menjadi komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Seorang implementor harus bisa berpikir visioner dalam bekerja. Memikirkan bagaimana suatu kebijakan akan menjadi baik sesuai tujuan yang diinginkan. konsistensi implementor terhadap kebijakan yang telah dibuat juga diharapkan tetap pada pendiriannya untuk selalu berupaya maksimal menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya berdasar penelitian lapangan dapat diketahui bahwa komitmen pegawai Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya sebagai Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sudah menunjukkan sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam hal pengelolaan sampah diantaranya adalah dibuatnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan Sistem Informasi Pengangkutan Sampah *System Waste Transportation* (SWAT).

Hal itu merupakan sikap pelaksana yang berkomitmen selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya bidang pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Masyarakat menanggapi kinerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya telah bekerja dengan baik dengan melakukan beberapa ide seperti adanya Rumah Kompos, Taman-

taman yang semakin banyak, Surabaya yang semakin asri, sehingga kenyamanan masyarakat terjamin.

### **5. Variabel Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana**

Komunikasi menentukan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014. Seorang pembuat kebijakan diharapkan mengetahui kewajiban mereka dalam pekerjaan. Pembuat kebijakan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya terkait dengan kebijakan yang dibuat. Komunikasi yang dilakukan dengan pihak terkait harus jelas, transparan, tepat. Komunikasi yang baik diharapkan membuat satu komitmen dan satu misi antara pembuat kebijakan, implementor dan target sasaran bisa berjalan dengan baik.

Komunikasi didalam dan antara organisasi merupakan suatu yang sulit. Dalam berkomunikasi terkadang tidak bisa tersampaikan dengan baik sesuai yang diinginkan. Terdapat kendala atau penyimpangan yang disengaja atau tidak. Apabila suatu informasi yang dikomunikasikan salah atau sedikit menyimpang maka hasil yang diharapkan tidak sesuai tujuan kebijakan.

Pengelolaan sampah di Kota Surabaya sejauh ini berjalan dengan baik. Masyarakat banyak mengetahui apa program yang dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya. Namun, komunikasi selama ini hanya sebatas melalui petugas lapangan Yustisi dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya. Petugas Lapangan Yustisi masih kurang maksimal juga. Kurangnya jumlah personil dan kendaraan menjadikan kendala tidak maksimalnya kinerja mereka. Komunikasi melalui media massa atau elektronik juga masih kurang.

### **6. Variabel Hubungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi kondisi lingkungan mempunyai pengaruh yang penting pada organisasi pelaksana. Lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar membuat suatu kebijakan sulit dijalankan dan akan terhambat. Namun dalam penelitian lapangan penulis menemukan bahwa lingkungan sekitar mendukung kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kota Surabaya.

Lingkungan ekonomi masyarakat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karena mampu memanfaatkan bank sampah untuk mengumpulkan sampah yang masih bisa diolah seperti botol plastic, kaca, logam. Lingkungan Politik dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sepenuhnya mendukung kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Anggaran

yang diajukan kepada DPRD tidak pernah terkendala. Anggota DPRD memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan yang dibuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Sikap tersebut menjelaskan bahwa lingkungan politik sangat mendukung keberhasilan kebijakan publik khususnya Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya.

### **SIMPULAN**

Ukuran dan tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas. Tujuan utama pengelolaan sampah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Namun implementasi peraturan tersebut dirasa belum merata menyeluruh keseluruh wilayah karena masih terdapat masalah di beberapa wilayah.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki dinas kebersihan dan pertamanan kota Surabaya dirasa sudah cukup dengan jumlah sebanyak 470 pegawai dengan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan. Namun jika dilihat dari beban kerja Sumber Daya Manusia masih kurang. Sumber Daya Keuangan didukung oleh sumber keuangan yang jelas yang berasal dari APBD pemerintah daerah kota Surabaya. Namun pakah sumber daya keuangan sudah mempertimbangkan cakupan luas tentang permasalahan sampah di Kota Surabaya.

Karakteristik Agen Pelaksana adalah kerjasama masyarakat dengan pemerintah menunjukkan kerjasama yang baik mulai dari tingkat dasar RT yang ditunjukkan dengan adanya komposter, RW dibentuknya bank sampah dengan jumlah 240 bank sampah di seluruh kota Surabaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemrosesan akhir yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sikap atau kecenderungan para pelaksana ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk mengolah sampah dengan adanya konsistensi dari pegawai dinas Kebersihan dan pertamanan kota Surabaya melalui inovasi pengolahan sampah dengan sistem transportasi pengangkutan sampah (*System Waste Transportation*) dan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di daerah Benowo dan Wonorejo.

Komunikasi antar organisasi yang dilakukan oleh para pelaksana pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Masih sebatas komunikasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dan Kelompok Sasaran yaitu masyarakat.

Lingkungan sosial masyarakat dapat diketahui bahwa telah terlaksana dengan baik terbukti dengan adanya bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat,

dengan adanya bank sampah masyarakat mampu memperoleh pendapatan dari sampah yang diolah, artinya lingkungan ekonomipun terpenuhi, selain itu dari lingkungan politik juga terlihat baik dengan adanya dukungan dari anggota dewan dalam memberikan kebijakan yang berdampak positif dalam pengelolaan sampah di kota Surabaya.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui di lapangan ternyata masih dijumpai kekurangan, untuk itu saran yang diajukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 kepada masyarakat lebih menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Dari jumlah sumber daya manusia perlu penataan pegawai senaiknya disesuaikan dengan beban kerja. Kebutuhan anggaran diharapkan disesuaikan dengan kuantitas atau volume sampah yang diolah.
3. Peningkatan komitmen untuk penciptaan inovasi baru perlu ditingkatkan sehingga pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik. Inovasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.
4. Penambahan personil sesuai dengan tugas dan pekerjaan dirasa perlu untuk membuat komunikasi tiap divisi kerja semakin maksimal dan optimal.
5. Komunikasi antar organisasi lebih diperluas kepada organisasi perangkat daerah yang berkepentingan menyangkut penanganan pengelolaan sampah

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Mulyana, Deddy. (2002). *Ilmu Komunikasi Suatu pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, J. Lexi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subagyo, P.Joko, 2006 "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek", Penerbit Rineka

Cipta, Cetakan Ke-5. Jakarta.

SWA.co.id tgl 26-03-2015 pukul 09.20

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo